

# LIPUTAN BERITA DI DAERAH KONFLIK: BENTUK PEMBERITAAN SURAT KABAR *SERAMBI INDONESIA* DI ACEH

Oleh:

Hamdani M. Syam

Universiti Kebangsaan Malaysia

h\_dhani1978@yahoo.com

## ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk melihat bentuk pemberitaan halaman depan surat khabar *Serambi Indonesia* antara sebelum dan selama Darurat Militer berlaku di Aceh. Pemerintah Indonesia telah mendeklarasikan Darurat Militer ke atas Aceh pada 19 Mei 2003. Pendeklarasian ini menyediakan ruang untuk suatu kajian tentang bentuk pemberitaan surat khabar di suatu daerah yang sedang konflik. Tulisan ini melihat kesan pendeklarasian Darurat Militer tersebut terhadap bentuk pemberitaan surat khabar *Serambi Indonesia*. Dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), halaman depan surat khabar *Serambi Indonesia* telah dijadikan sampel. Daripada sampel tersebut, sejumlah 204 berita telah analisis secara statistik. Hasil analisis tersebut mendapati bahawa ada perbezaan yang signifikan mengenai bentuk pemberitaan surat khabar *Serambi Indonesia* antara sebelum dengan selama Darurat Militer di Aceh. Hasil analisis ini menunjukkan bahawa selama Darurat Militer di Aceh banyak berita tentang konflik Aceh dalam surat khabar *Serambi Indonesia* bersumber elit pemerintah, TNI dan polisi. Berita-berita yang bersumberkan masyarakat dan GAM kurang menjadi perhatian oleh surat khabar *Serambi Indonesia* selama Darurat Militer di Aceh. Bahkan berita yang bersumber dari GAM tidak diberi ruang untuk diberitakan. Dari segi tema berita, lebih banyak berita tentang konflik Aceh yang diberitakan di halaman depan *Serambi Indonesia* selama berlakunya Darurat Militer di Aceh. Dari segi arah berita, banyak berita yang berarah positif dalam surat khabar *Serambi Indonesia* selama daripada sebelum Darurat Militer di Aceh. Berita-berita yang berarah positif tersebut diarahkan kepada kegiatan yang dilakukan oleh TNI dan polisi mengenai konflik Aceh. Dengan begitu dapat dikatakan bahawa apabila keadaan negara berada dalam situasi yang terancam maka pemberitaan melalui media dilakukan sangat berhati-hati, berbanding dengan negara-negara yang keadaan sosio-budaya, ekonomi dan politik yang tenang. Hal ini dilakukan demi menjaga keselamatan negara dari disintegrasi bangsa.

## Kata Kunci:

Pemberitaan, Media, Pembangunan

## Pendahuluan

Konflik adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu, perlawanan, menolak atau memaksa kehendak seseorang, organisasi atau institusi untuk menguasai. Konflik kadang-kadang

tidak selalunya dikaitkan dalam bentuk kekerasan atau pembunuhan (Green 1964). Tetapi, persoalan persepsi dan pendapat bisa juga dianggap sebagai konflik.

Jenis konflik yang terjadi di Aceh dapat digolongkan sebagai kombinasi konflik struktural dan konflik kepentingan. Konflik struktural terjadi ketika terdapat ketimpangan untuk mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya yang ada di Aceh. Pihak yang berkuasa memiliki wewenang formal untuk menetapkan kebijakan umum, biasanya mereka lebih memiliki peluang untuk menguasai akses dan melakukan kontrol terhadap pihak lain. Di sisi lain persoalan geografis dan faktor sejarah atau waktu seringkali dijadikan alasan untuk memusatkan kekuasaan serta pengambilan keputusan yang hanya menguntungkan pihak tertentu. Sedangkan konflik kepentingan adalah konflik yang disebabkan persaingan kepentingan yang dirasakan atau yang secara nyata tidak bersesuaian terhadap pihak tertentu. Konflik kepentingan terjadi ketika satu pihak atau lebih meyakini untuk memuaskan kebutuhannya, pihak lain yang harus terkorban.

Latar belakang muncul GAM di Aceh pada awalnya merupakan sebuah perjuangan kelanjutan dari Republik Islam Aceh (RIA) pada masa pemerintahan Soekarno. Konflik tersebut lebih kepada kekecewaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah yang berkuasa pada masa itu, karena menurut masyarakat Aceh aspirasi mereka tidak pernah dihiraukan oleh pemerintah Indonesia sebagai penganang jasa dan harta benda yang telah diberikan untuk membentuk sebuah negara yang tidak pernah ada sebelumnya yaitu Negara Republik Indonesia (Neta S. Pane, 2001). Apa yang diharapkan oleh masyarakat Aceh dari pemerintah Indonesia hanyalah impian semata-mata, dan yang terjadi justru telah menghilangkan identitas keacehan yang pernah dirasakan pada masa dahulu.

Pada masa Teungku Muhammad Daud Beureueh (1947-1951) memimpin Aceh, masyarakat Aceh mengalami kekecewaan yang mendalam. Masyarakat Aceh kehilangan sesuatu yang paling mereka cintai. Janji Soekarno untuk menjadikan

Aceh sebagai Daerah Istimewa Aceh tidak pernah terwujud. Bahkan daerah Aceh dipaksa untuk digabungkan ke dalam wilayah Sumatera Utara. Sejak itu rasa kesedihan dan keperihatinan semakin terasa di dalam dada masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh merasakan aspirasi mereka tidak pernah diwujudkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat hanya berjanji saja akan mengabdikan keinginan masyarakat Aceh, tapi semua itu hanyalah sebagai pemanis mulut saja. Masyarakat Aceh kecewa dengan sikap pemerintah pusat yang tidak menampung dan mewujudkan aspirasi yang mereka tuntut. Masyarakat Aceh beranggapan janji itu hanya dijadikan sebagai alat politik pemerintah pusat yang berkuasa pada saat itu (M. Nur El Ibrahim 2001; M Kaoy Syah & Lukman Hakiem, 2000).

Dari rasa kecewaan itu, pandangan dan pola pemikiran masyarakat Aceh mulai berubah. Indonesia dianggap sebagai negara *neo-colonialism* selepas Belanda dan Jepang. Masyarakat Aceh tidak dapat menerima keadaan ini dan bangkitlah beberapa gerakan perlawanan seperti gerakan perlawanan yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh yang terkenal dengan perlawanan '*Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia*' (DI/TII) pada tahun 1953-1959, seterusnya muncul gerakan perlawanan yang dipimpin oleh Hasan Tiro pada tahun 1976 yang terkenal dengan '*Aceh Sumatra National Liberation Front*' (ASNLF), dan nama itu terkenal dengan sebutan GAM '*Gerakan Aceh Merdeka*' (Sayadi, 2001).

Pada tahun 2001, Aceh dinyatakan sebagai daerah *Otonomi Khusus* dan menjadi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi *Nanggroe Aceh Darussalam*. Nama *Nanggroe Aceh Darussalam* diberikan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang No 18 Tahun 2001 tentang *Otonomi Khusus* bagi Aceh. Melalui undang-undang ini pemerintah pusat ingin melakukan keseimbangan keuangan dengan melakukan pembagian hasil alam (minyak dan gas) antara pemerintah pusat dengan Aceh dan tidak lagi sentralistik seperti pada saat Soeharto. Dengan sistem sentralistik pada masa Soeharto, ia telah membawa semua hasil kekayaan alam Aceh untuk membangun Jakarta dan dibagikan untuk Aceh dalam skala yang sangat kecil sekali. Inilah salah satu sebab terjadinya pergolakan politik antara Aceh dengan pemerintah pusat (Jakarta) pada masa Soeharto berkuasa (M. Isa Sulaiman 2000).

Pada tahun 1998, dengan tuntutan reformasi di Indonesia membuat kekuasaan Soeharto jatuh. Walaupun begitu masyarakat Aceh terus hidup

dalam lingkaran kesusahan dan kemiskinan. Aceh hanya terkenal sebagai penghasil alam yang banyak, tetapi masyarakat Aceh hanya melihat dan mendengar saja. Mereka tidak pernah merasakan segala yang dihasilkan oleh daerahnya sendiri (Riza Sihbudi et al. 2001).

Malahan masyarakat Aceh beranggapan *Otonomi Khusus* yang diberikan melalui pemerintahan Megawati Soekarno Putri hanya simbol saja, sedangkan dari segi pelaksanaannya masih belum dapat dirasakan. Anggapan seperti ini disebabkan bahwa masyarakat Aceh sudah banyak dibohongi oleh pemerintah pusat semenjak Soekarno menjadi presiden sehingga kepada presiden Megawati Soekarno Putri. Aceh terus dijanjikan sebagai *Daerah Istimewa* dan *Otonomi Khusus* tapi pelaksanaannya tidak diwujudkan. Masyarakat Aceh terus hidup menderita dalam keadaan yang melarat. Kadang-kadang mereka dipukul, rumah dibakar, anak gadis dan isteri ada yang diperkosa bahkan ada yang ditembak sampai mati (Riza Sihbudi et al. 2001). Masyarakat Aceh menuntut pada pemerintah pusat agar memberikan hukuman yang sesuai ke atas mereka yang melakukan kejahatan kemanusiaan di Aceh. Tapi hal ini tidak mendapat respon dari pemerintah pusat, sehingga membuat masyarakat Aceh harus terus melakukan perlawanan dengan cara mengangkat senjata kepada mereka yang telah berbuat kejahatan di bumi Aceh.

Sampai pada tahun 2003, masalah Aceh masih merupakan persoalan Indonesia yang belum terselesaikan. Aceh masih bergelut dengan pemerintah pusat. Maka untuk menyelesaikan masalah tersebut, pada tanggal 19 Mei 2003 Presiden Megawati Soekarno Putri telah mendeklarasikan Aceh sebagai daerah Darurat Militer melalui Keppres RI No 28 Tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan Darurat Militer di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

## Permasalahan

Pendeklarasian Aceh sebagai daerah Darurat Militer pada 19 Mei 2003 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri di Jakarta (Lihat Keppres RI No 28 Tahun 2003) menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Aceh khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Penerapan dan pencetusan Aceh sebagai daerah Darurat Militer merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memulihkan keamanan yang terjadi di Aceh melalui pendekatan bersenjata. Dengan cara ini akan mengakibatkan jatuhnya korban di pihak masyarakat Aceh lebih besar lagi (M. Ridha Saleh 2003).

Apakah pengaruh dari pelaksanaan Darurat Militer di Aceh terhadap bentuk pemberitaan surat kabar? Apakah bentuk pemberitaan berbeda sebelum Aceh dicituskan sebagai daerah Darurat Militer? Pengkajian ini akan melihat perbedaan dengan cara membandingkan bentuk pemberitaan surat kabar *Serambi Indonesia* antara sebelum dan selama berlakunya Darurat Militer di Aceh.

### Tinjauan Teori

Pemikiran para pengkaji-pengkaji bidang komunikasi seperti McQuail (1987; 1992), Hooper (1984), Dutton (1986), dan Asiah Sarji (1995), mengaitkan sumber pergerakan perkembangan dan proses pengwujudan bentuk pemberitaan di negara-negara di dunia berkait erat dengan keadaan lingkungannya baik dari segi politik, ekonomi maupun sosio-budaya. Asiah Sarji (1995), mengatakan alam sekitar seperti sosio-budaya, ekonomi dan politik di sebuah negara akan mempengaruhi corak pemberitaan surat kabar. Dengan kata lain, selagi sebuah negara itu berada dalam keadaan terancam, maka selagi itulah bentuk pemberitaan surat kabar dilakukan lebih berhati-hati berbanding dengan negara-negara yang keadaan alam sekitar sosio ekonomi dan politik yang kondusif.

Pemikiran Cohen (1963), media massa berperan sebagai penyampai informasi dan membentuk persepsi masyarakat terhadap isu atau persoalan yang disampaikan. Wujudnya satu keyakinan bahwa media massa memiliki pengaruh dalam memupuk pemikiran pembaca ataupun memenuhi kemauan pembaca berkaitan dengan beberapa isu yang sentiasa menjadi perhatian. Akibatnya masyarakat secara umum akan melakukan perhatian dan memilih informasi yang disampaikan melalui surat kabar sehingga membuat masyarakat merubah pandangan mereka.

Dengan demikian dapat dilihat, bahwa pengaruh media sangat besar terhadap masyarakat. Media dapat mengubah pola hidup masyarakat ke arah yang diinginkan oleh orang yang membuat berita. Kebebasan media akan menjadi bumerang dan akan membawa kehancuran terhadap negara apalagi negara tersebut tengah melakukan proses pembangunan. McQuail (1992), media berusaha membentuk realitas sosial di kalangan pembacanya. Walau bagaimanapun pengaruh tersebut mempengaruhi bagaimana khalayak memperoleh informasi dengan cara mewujudkan kesadaran terhadap pesan, pengaruh sosio-budaya dan pemilihan isi surat kabar. Media dikatakan berupaya menentukan agenda pemikiran dan perbincangan khalayak.

Secara langsung ataupun tidak langsung media berkemungkinan mempengaruhi persepsi khalayak.

Surat kabar *Serambi Indonesia* merupakan surat kabar yang diterbitkan dan beroperasi di daerah konflik. Keadaan yang begini memerlukan untuk membuat pengkajian terhadap surat kabar di daerah konflik. Apakah surat kabar ini akan digunakan oleh pihak yang sedang melakukan perselisihan sebagai alat propaganda dalam mengekalkan usaha mereka seperti kajian yang dilakukan Hooper (1984). Hooper (1984) mengatakan bahwa surat kabar di daerah konflik selalu mengalami tekanan (*pressure*) oleh mereka yang berkuasa untuk menyampaikan propaganda kepada masyarakat yang terlepas dari konflik. Antonio Gramsci (1978) dalam bukunya *The Prison Notebook* mengatakan bahwa media merupakan tempat di mana pelbagai bentuk ideologi memanfaatkannya sebagai tempat untuk berkompetisi. Oleh sebab itu, untuk mengetahui bentuk pemberitaan surat kabar di daerah konflik adalah sangat penting. Sebab surat kabar merupakan satu mekanisme atau tempat yang membolehkan orang ramai mengetahui dan memahami realitas sosial di sekeliling mereka. Sebagian besar pakar media dan sosiologi yang berfahaman *pluralist-functional* berpandangan bahwa surat kabar merupakan satu cermin sosial yang secara jujur mencerminkan apa yang berlaku dalam sebuah masyarakat karena mereka menganggap bahwa surat kabar adalah satu institusi netral dan bebas dari dominasi pihak berkuasa (Dutton 1986). Surat kabar dengan perspektif ini berupaya memberitakan dan selalu memprioritaskan kepentingan dan pandangan dalam pelbagai kelompok masyarakat.

Pemikir kritis dan berhaluan Marxist mempunyai pandangan yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa surat kabar adalah salah satu alat penting elit pemerintah yang sentiasa berusaha mengenakan pengawasan ideologi ke atas kelompok rakyat biasa (Dutton 1986). Itulah sebabnya ada pihak-pihak pemerintah yang berusaha mempengaruhi institusi surat kabar melalui undang-undang. Mereka coba memiliki media itu dengan tujuan untuk memajukan ideologinya dan seterusnya mengekalkan hegemoninya supaya mereka dapat terus berkuasa.

Pengawasan terhadap isi dan kerja surat kabar merupakan persoalan yang umumnya berlaku, tidak ada surat kabar di dunia ini yang bebas mutlak dari pemerintah. Tetapi perbedaan hanya saja terletak pada bentuk pengawasan saja. Masalah ini biasanya tidak diprioritaskan oleh pemerintah, hal ini disebabkan berkaitan dengan cita-cita pemerintah

dalam membangun negara. Apalagi dalam mempertahankan status quo, pemerintah harus mendapatkan dukungan dan legitimasi masyarakat melalui pemberitaan yang disampaikan oleh media massa.

Begitu juga dengan surat kabar *Serambi Indonesia* di Aceh. Surat kabar ini pada tahun 2002 dan 2003 merupakan surat kabar yang masih eksis memberitakan mengenai situasi konflik Aceh. Idealnya peranan surat khabar di daerah konflik sangat penting dalam menggambarkan fakta konflik yang terjadi di lapangan. Kalau tidak ada pengawasan yang baik dari pemerintah akan memperburuk terhadap situasi bangsa dalam menyelesaikan konflik secara menyeluruh. Walaupun pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah Aceh dengan cara menggunakan pendekatan Darurat Militer, tapi pemerintah akan memberikan perhatian penuh terhadap pemberitaan media agar penyelesaian masalah Aceh melalui pendekatan Darurat Militer ini tidak akan menimbulkan kesan negatif terhadap integritas negara Indonesia sendiri.

### **Konsep Media Negara Membangun**

Kajian ini akan menggunakan teori media negara membangun. Pemilihan teori media negara membangun adalah untuk melihat dari segi konsep mengenai bentuk pemberitaan surat kabar dalam situasi konflik atau disebutkan juga dalam keadaan negara lagi tidak stabil. Dalam teori media negara membangun dikatakan, para pemberita akan selalu bekerjasama dengan pemerintah dalam pembangunan negara. Dengan begitu, dalam teori ini tidak wujud kebebasan media secara mutlak.

Teori media negara membangun dicetuskan oleh Hachten (1981). Teori ini merupakan perubahan terhadap model empat teori media yang telah dibentuk oleh Siebert, Peterson, dan Schramm pada tahun 1956. Dalam bukunya *The World News Prism* (1981), Hachten mengusulkan tipologi lima konsep yang mempertahankan *ideologi otoritarian* dan *komunis*, menggabungkan *libertarian* dan *tanggungjawab sosial* ke dalam *konsep Barat*, dan menambahkan dua teori baru yaitu *revolusioner* dan *pembangunan*. Sebagian besar teori yang dikemukakan itu berkaitan dengan bentuk sistem politik dan ekonomi sebuah negara. Nampaknya, seolah-olah, setiap satu sistem politik di sebuah negara mempunyai teori media yang berbeda.

Seiring perjalanan waktu dan perkembangan masa, teori yang telah ada itu dianggap klasik dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman untuk mewakili sistem media negara-negara di dunia. Beberapa sarjana komunikasipun

mengajukan kritik bahwa teori yang ada tidak mampu mewakili sistem media di dunia.

Menurut sarjana komunikasi Universiti Kebangsaan Malaysia, Mohd. Safar (1993), penciptaan sistem media akan senantiasa peduli kepada kebijakan dan keperluan negara yang diwakilinya dengan melihat bentuk, warna struktur dan politik di mana ia beroperasi. Ia mencerminkan sistem pengawasan sosial yang mungkin berbentuk undang-undang, politik, ekonomi atau sosial di mana hubungan individu dan institusi disesuaikan. Keadaan ini memperjelas mengenai sistem media sebuah negara, mungkin sistem tersebut tidak sama dengan negara lain dan perubahan juga berkemungkinan berlaku akibat faktor alam sekitar yang mempengaruhi perjalanannya. McQuail (1987), teori media massa yang telah ada itu akan berubah mengikut keadaan masyarakat.

Mohd. Safar (1993), sistem politik berkaitan dengan sistem media. Media di negara-negara membangun atau negara-negara Dunia Ketiga seperti yang dikatakan oleh Hachten (1981) sering dianggap mendukung dan bekerjasama dengan pemerintah dalam pembangunan negara. Dalam sistem pemerintahan yang begitu bebas sekalipun media terpaksa mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa, dimana wujudnya adalah pengawasan terhadap media, dilakukan demi menjaga ketentraman negara. Pengawasan ini selalu terjadi, kadang-kadang terjadi perubahan-perubahan terhadap sistem pengawasan ini, dari pengawasan yang sepenuhnya (*authoritarianisme*), berubah menjadi pengawasan yang agak longgar (*libertarianisme*). Hachten (1981), kebebasan mutlak adalah satu dongengan. Sistem media yang berwujud negara dapat menggambarkan sistem politik dan ekonomi negara tersebut.

Pendapat Merrill (1974), menunjukkan hubungan intim antara pemerintah dengan media massa. Kedua-duanya saling perlu memerlukan. Merrill (1974), sistem politik yang merupakan wujud dari ideologi politik, sudah tentu mempunyai kaitan untuk memandu ke arah kemajuan negaranya. Dengan begitu, ia mengakui media massa dan pembangunan negara mempunyai hubungan simbiotik yang penting.

Adapun prinsip-prinsip media pembangunan yang disampaikan oleh McQuail (1987) ialah:

1. Media harus menerima dan melaksanakan tugas pembangunan sejajar dengan dasar kebangsaan yang ditubuhkan.
2. Kebebasan media hendaklah terbuka kepada pengawasan berdasarkan (a) kepentingan ekonomi; (b) keperluan pembangunan masyarakat.

3. Media harus memberikan keutamaan dari segi isi terhadap budaya dan bahasa nasional.
4. Media harus memberikan keutamaan kepada berita dan informasi yang berhubungan dengan negara membangun lain yang mempunyai kedekatan dari segi geografi, budaya, dan politik.
5. Demi kepentingan pembangunan, negara mempunyai hak untuk campur tangan dalam operasi media, termasuk melarang untuk diberitakan, dan subsidi pemerintah.

Dikatakan pula oleh McQuail (1987), di negara sedang membangun, fungsi terpenting media adalah menyebarkan dan menafsir berita kepada masyarakat. Sedangkan mengenai hubungan media dengan pemerintah di negara membangun adalah berbeda mengenai hubungan media dengan pemerintah di negara Barat. Media di negara membangun biasanya mempertahankan ideologi dan sistem politik pemerintah yang sudah ada.

F. Rachmadi (1990) menguraikan sistem media negara membangun sebagai berikut:

1. Sistem media cenderung mengikuti sistem media negara bekas penjajahnya.
2. Media di negara membangun berada dalam bentuk transisi. Ia masih berusaha mencari bentuk yang tepat atau mencari identitas sendiri. Maka media negara membangun masih dalam taraf transisi. Biasanya media negara membangun mempunyai bentuk kurang stabil.
3. Negara membangun pada umumnya sedang membangun. Hal ini menyebabkan media dalam negara tersebut dituntut untuk mempunyai peranan sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*), di mana media bersama-sama pemerintah mempunyai tanggungjawab atas keberhasilan pembangunan.
4. Secara umum kebebasan media di negara membangun diakui ada, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat batasan-batasan, kerana media dituntut untuk ikut menjamin atau mengusahakan stabilitas politik dan ikutserta dalam pembangunan ekonomi.
5. Sistem dan pola hubungan antara media massa dengan pemerintah mempunyai tendensi perpaduan antara sistem-sistem yang ada (libertarian, authoritarian, social responsibility, dan sebagainya).

Di kebanyakan negara membangun, media mengamalkan konsep pembangunan sebagaimana yang telah digariskan oleh UNESCO dalam satu forum mengenai konsep pembangunan negara. Yaitu, pertama, semua alat komunikasi massa

seperti surat kabar, radio, televisi, film, dan pelbagai alat komunikasi lainnya hendaklah digerakkan oleh pemerintah pusat untuk membantu usaha pembangunan negara, menghapus buta huruf dan kemiskinan, membina kesadaran politik, membantu pembangunan ekonomi. Kedua, media seharusnya bekerjasama dengan pihak berkuasa, bukan melawannya.

Di negara-negara berkembang, media massa dapat memberikan sumbangannya yang cukup besar sebagai alat perubahan sosial dalam usaha pembangunan bangsa. Media massa mengemban fungsi pendukung kemajuan dan meningkatkan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Media hadir di tengah-tengah masyarakat kerana keberadaannya diperlukan oleh masyarakat. Schramm (1977) menyatakan bahwa media merupakan buku harian tercetak bagi manusia. Media massa sebagai sumber informasi yang terperinci dan interpretasi tentang masalah-masalah umum. Supaya media dapat memberi sumbangan yang lebih banyak kepada program pembangunan negara, pemberita harus membedakan cara penyampaian antara berita kriminal, politik, dengan berita hiburan.

Kebebasan hakiki terhadap media di beberapa negara berkembang tidak ada, yang ada hanya media menjadi alat pemerintah untuk pembangunan negara. Ichlasul Amal (2000) mengatakan bahwa dalam negara membangun kebebasan media dapat membawa masyarakat pada situasi yang anarkis (*lawless*). Persoalan yang sangat kentara yang dihadapi oleh negara-negara membangun adalah upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan upaya pengendalian intervensi keuangan internasional dan lain-lain berhubungan dengan persoalan pembangunan.

Pendapat para sarjana komunikasi seperti Hachten (1981); Mohd. Safar (1993); Merrill (1974); McQuail (1987); dan F. Rachmadi (1990), mengatakan bahwa di negara yang sedang membangun, fungsi terpenting media adalah menyebarkan dan mentafsir berita ke arah pembangunan negara. Media di negara membangun akan memilih berita dan bekerjasama dengan pemerintah untuk sama-sama membangun negara. Media negara membangun akan mendukung setiap tindakan dan perencanaan pemerintah dalam pembangunan negara.

### Definisi Berita

Terdapat pelbagai definisi berita yang diberikan oleh sarjana komunikasi. Di antaranya ialah Lippmann (1972), tokoh terkenal dalam bidang kewartawanan, mengatakan bahwa berita berhu-

bungan dengan puncak berlakunya peristiwa yang dideskripsikan, mempunyai bentuk tertentu dan boleh mengisi waktu kekosongan yang memenuhi aspek fakta dan berita, peristiwanya tidak terpisah daripada kebenaran.

McQuail (1987) mendefinisikan berita sebagai satu bentuk peristiwa yang dipersembahkan dalam bentuk ringkasan bagi perkara-perkara paling penting pada bagian permulaan dan disesuaikan dengan konsep piramida terbalik. Maeseneer (1986) mendefinisikan berita ialah suatu informasi yang baru mengenai suatu peristiwa yang berlaku dan memberi kesan kepada khalayak serta menarik minat para pembaca. McDougall (1972), berita adalah laporan mengenai sesuatu kejadian, tapi bukan kejadian itu sendiri.

Harris dan Johnson (1965) telah menggariskan beberapa definisi berita yang menurut pandangan mereka lebih relevan dan signifikan. Mereka berpendapat bahwa berita merupakan laporan fakta dan pendapat mengenai sesuatu kejadian yang menarik minat khalayak. Berbagai bentuk informasi yang menjadi bahan perbincangan khalayak dapat dianggap sebagai berita yang menarik. Dari segi nilai berita, sesuatu yang banyak dibicarakan oleh orang mempunyai nilai berita yang tinggi berbanding dengan berita yang kurang mendapat perhatian orang.

Kesimpulannya, berita adalah suatu laporan peristiwa yang mempunyai ciri-ciri menjadikan perkara tersebut bernilai. Ia bukan dilihat sebagai satu bentuk peristiwa, tapi lebih kepada suatu pilihan yang digunakan oleh golongan penilai profesional berdasarkan kriteria tertentu. Berita terdiri daripada fakta-fakta, tetapi bukan semua fakta dianggap sebagai berita. Berita biasanya tentang manusia dan fenomena-fenomena penting yang berlaku dalam dunia.

### **Undang-Undang Pers di Zaman Reformasi**

Pada 21 Mei 1998, terjadi peralihan pemerintahan Indonesia dari zaman Orde Baru yang sangat otoriter kepada zaman Reformasi. Di zaman Reformasi masyarakat menuntut perubahan terhadap sistem politik Indonesia dari sistem otoriter kepada sistem politik demokrasi yang berpihak kepada rakyat. Dengan adanya perubahan terhadap sistem politik tersebut diharapkan juga ada perubahan terhadap institusi surat khabar dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dalam masyarakat.

Pada masa Orde Baru surat khabar tidak bebas karena peraturannya harus berdasarkan Surat

Izin Usaha Penerbitan Press (SIUPP). Apabila ada surat kabar yang berani melawan pemerintah maka pemerintah tidak segan-segan untuk menarik surat izin ini. Media massa tidak bisa menjalankan tugas profesionalnya, media massa banyak dikontrol oleh pemerintah dalam hal pemberitaan, sehingga membuat masyarakat untuk mengetahui sesuatu menjadi terkendala (Ibnu Hamad, 2004).

Ketentuan SIUPP ini dicantumkan di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 pasal 13 ayat 5, yaitu:

“Setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers memerlukan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers selanjutnya disingkat dengan SIUPP yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ketentuan-ketentuan tentang SIUPP akan diatur oleh pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers (Moh. Mahfud MD, 1999)”.

Dengan adanya ketentuan ini, pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan tentang SIUPP dalam bentuk Peraturan Menteri Penerangan No. 1 / PER / MENPEN / 1984. Dengan Permenpen inilah kemudian pemerintah membreidel beberapa penerbitan surat kabar dan majalah seperti *Prioritas*, *Sinar Harapan*, *Tabloid Monitor*, *Majalah Tempo*, *Majalah Editor* dan *Tabloid Detik*. Dianggap surat kabar dan majalah ini tidak bisa bekerjasama dengan pemerintah. Pada masa Orde Baru, tidak jarang hak untuk menyensor bahkan sekaligus membreidel penerbitan surat kabar apabila dianggap menyebarkan berita yang terkesan merongrong wibawa pemerintah (Moh. Mahfud MD, 1999).

Pendapat para pengkaji, seperti McQuail (1987; 1992), Hooper (1984), Dutton (1986), dan Asiah Sarji (1995), kehadiran perusahaan penerbitan media di dunia manapun sangat erat kaitannya dengan sistem politik sebuah negara di mana media itu hadir. Maka dengan peralihan sistem pemerintahan Indonesia dari Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto selama 32 tahun kepada pemerintahan BJ Habibie yang dikenal dengan era reformasi telah ikut mewarnai perubahan terhadap sistem politik yang telah ada di Indonesia. Pemerintahan BJ Habibie menghapus undang-undang pers pemerintahan Soeharto yaitu UU No 21 Tahun 1982 dan menggantinya dengan undang-undang pers yang baru yaitu UU No. 40 Tahun 1999, karena dianggap UU No 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Di dalam UU No. 40 Tahun 1999 tidak menyebutkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pres (SIUPP). Maka dengan tidak adanya SIUPP lagi bagi perusahaan pers membuat surat kabar di zaman Reformasi muncul sudah tidak jelas lagi. Ibarat kata pepatah ‘surat kabar sudah tumbuh

*bagai jamur di musim hujan*'. (Ibnu Hamad, 2004), perubahan yang terjadi pada era reformasi ini tidak selamanya berdampak positif terhadap masyarakat. Banyak kalangan masyarakat mengatakan bahwa berita-berita yang disuguhkan beberapa surat khabar terkesan hanya menjadi alat provokator yang bukannya ikut membantu menyelesaikan konflik, berita terlalu berani mengkritik pemerintah, dan pornografi banyak dipublikasi.

## **Pembahasan**

### **Peraturan Pers Selama Darurat Militer di Aceh**

Setelah pemerintah mendeklarasikan Darurat Militer di Aceh pada 19 Mei 2003, bentuk pemberitaan surat kabar mengenai isu-isu tentang Aceh sudah tidak lagi mengacu pada UU No 40 Tahun 1999 yang dikatakan sangat bebas itu. Tapi ada peraturan lain, yaitu;

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 43 Tahun 2003 Pasal 3.
2. Maklumat Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh No.5/VI/PDMD-NAD/2003.

Dalam Keputusan presiden tersebut pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 menyebutkan bahwa:

1. Kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan asing dan koresponden untuk media asing di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat dilakukan secara selektif setelah mendapat persetujuan Menteri Luar Negeri atas nama Presiden selaku Penguasa Darurat Militer Pusat.
2. Kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan nasional untuk media nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Penguasa Darurat Militer Daerah.
3. Segala resiko dan akibat yang timbul dari kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan asing maupun nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Dalam Maklumat Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh menyebutkan: Kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan asing dan koresponden untuk media asing diatur sebagai berikut:

1. Kegiatan peliputan hanya diijinkan sampai di ibukota kabupaten dan kota. Untuk menjaga keselamatan dan keamanan kegiatan di luar ibukota kabupaten dan kota harus dilakukan bersama dengan pasukan TNI atau aparat Kepolisian.

2. Setiap melakukan perpindahan tempat harus melapor pada aparat TNI/Polri setempat di daerah yang akan ditinggalkan dan di daerah yang didatangi. Direkomendasikan dalam perpindahan tempat dilakukan bersama aparat TNI/Polri.
3. Segala resiko selama melaksanakan kegiatan menjadi tanggung jawab pribadi.

Barang siapa yang melanggar ketentuan maklumat ini:

1. Akan diambil tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku.
2. Bagi warga negara asing, Lembaga Swadaya Masyarakat Asing, wartawan asing dan koresponden untuk media asing harus meninggalkan Provinsi NAD paling lama 1 x 24 jam setelah keluarnya keputusan.
3. Bagi koresponden untuk media asing yang berdomisili di Propinsi NAD tidak diperbolehkan melakukan kegiatan jurnalistik di Propinsi NAD.

### **Bentuk Pemberitaan Surat Kabar *Serambi Indonesia***

Untuk melihat bentuk pemberitaan surat kabar *Serambi Indonesia*, telah dilakukan pengkajian dengan menggunakan metode analisis isi (*Content Analysis*) selama setahun mulai tanggal 19 November 2002 sampai 18 November 2003. Berita yang dipilih adalah berita-berita yang dimuat pada halaman depan surat khabar *Serambi Indonesia*. Sebanyak 204 sampel berita yang dipilih dan telah dianalisis dengan menggunakan SPSS (*Statistical Package for Social Science*). Berikut adalah hasil analisa.

### **Tema Berita**

Banyak definisi yang diberikan oleh para sarjana komunikasi mengenai tema. Di antara definisi tersebut mempunyai persamaan dari segi maksud. Dickinson (1959), tema ialah makna yang menyeluruh dari isi cerita dalam setiap ringkasan peristiwa. Tema dapat juga diartikan sebagai persoalan utama yang diungkapkan oleh penulis dalam sebuah penulisan berdasarkan sesuatu motif yang terdiri dari objek, peristiwa dan kejadian (Othman Puteh 1981 dan M. Thari 1975). Sedangkan Nor Zaliza Sarmiti (2003) mendefinisikan tema adalah ide atau persoalan utama pada berita. Adapun Siti Suryani (2004) mendefinisikan tema ialah ide yang menjadi asas sesuatu kenyataan. Dengan begitu dapat disimpulkan, tema adalah ide atau persoalan

utama pada sesuatu berita yang terkandung dalam surat kabar.

**Tabel 1**

Tema Berita	Masa	
	Sebelum Darurat Militer	Selama Darurat Militer
Konflik Aceh	32 (42%)	44 (58%)
Politik dalam negeri	4 (29%)	10 (71%)
Kriminal	10 (37%)	17 (40%)
Ekonomi	18 (60%)	12 (40%)
Kecelakaan & Bencana alam	5 (100%)	-
Agama	7 (100%)	-
Olah raga	2 (20%)	9 (80%)
Politik luar negeri	26 (76%)	8 (24%)
<b>Total</b>	<b>104</b>	<b>100</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari segi tema berita, tabel 1 menjelaskan bahwa surat kabar *Serambi Indonesia* selama Darurat Militer lebih banyak memfokuskan kepada berita konflik Aceh. Walaupun pada saat Aceh sebelum diberlakukan Darurat Militer ada juga menyediakan berita konflik Aceh, tapi jumlah lebih sedikit.

### Arah Berita

Menganalisis arah berita merupakan suatu yang penting karena dengan mengetahui arah berita ini akan nampak isu itu berpihak ke arah mana. Nurdin Abd. Halim (2001), arah berita ditentukan oleh si pembuat berita dan dapat memberikan makna besar terhadap pembaca. Sedangkan Siti Suryani (2004), arah berita adalah kecenderungan berita terhadap suatu isu. Manfaat mengetahui arah berita adalah untuk mengetahui mengenai pesan keseluruhan berita. Arah berita dalam media cetak akan nampak dari segi bahasa dalam melabelkan pihak lain. Apakah dilabelkan dalam bentuk positif, negatif, maupun netral (Shukor Kholil, 2000):

1. Arah berita positif, adalah berita-berita tentang peristiwa yang memberi keuntungan kepada pihak yang diberitakan.
2. Arah berita negatif, adalah berita-berita yang menimbulkan kerugian kepada pihak yang diberitakan.
3. Netral, adalah berita-berita yang tidak memberikan keuntungan dan tidak pula memberikan kerugian kepada pihak yang diberitakan.

**Tabel 2**

Arah Berita	Masa	
	Sebelum Darurat Militer	Selama Darurat Militer
Positif	15 (31%)	33 (69%)
Negatif	42 (56%)	36 (54%)
Netral	47 (60%)	31 (40%)
<b>Total</b>	<b>104</b>	<b>100</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 2 menunjukkan bahwa selama Darurat Militer di Aceh, surat kabar *Serambi Indonesia* lebih banyak memberitakan berita positif dibanding sebelum Darurat Militer terjadi di Aceh. Berita positif ini lebih banyak kepada peristiwa-peristiwa yang diberitakan terhadap militer. Sedangkan peristiwa-peristiwa yang diberitakan terhadap GAM lebih banyak diberitakan dalam bentuk negatif.

### Sumber Berita

Sumber berita penting dalam dunia kewartawanan. Tiada sumber tiada berita. Wartawan yang tidak menggunakan sumber sama seperti tentara yang ke medan perang tanpa ada senjata ataupun nelayan yang turun ke laut tanpa ada jalan (Faridah Ibrahim dan Mohd. Rajib, 2000).

Kadang-kadang para wartawan tidak menyaksikan setiap peristiwa yang terjadi, misalnya seperti kecelakaan di jalan raya. Wartawan baru tahu peristiwa tersebut dari laporan orang lain. Misalnya dari masyarakat, polisi, para pegawai pemerintah dan para karyawan perusahaan swasta dan lain-lain.

Penggunaan sumber dalam sesuatu berita boleh meningkatkan objektivitas dalam penulisan. Para wartawan atau pengarang berita sering diperingatkan oleh redaktur mengenai perkara ini di tempat mereka bekerja: '*Kamu tidak boleh guna berita itu jika kamu tidak tahu siapa sumbernya*'. Keabsahan sumber merupakan prioritas utama dalam penulisan sebuah berita (Faridah Ibrahim dan Mohd Rajib, 2000).

Cerita dalam surat kabar datang dari pelbagai sumber. Sumber merupakan tempat datangnya sesuatu berita atau tempat bahan berita itu diperoleh. Ia boleh didapatkan dari pelbagai sumber baik dari pemberita lain (agensi), para tokoh, juru bicara perusahaan atau organisasi dan lain-lain. Para wartawan sangat bergantung kepada sumber untuk mendapatkan bahan berita (Mohd. Salleh, 1985). Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa sumber



adalah tempat datangnya sesuatu berita baik berbentuk individu maupun agensi.

Sumber dalam bentuk individu adalah orang yang terlibat atau mengetahui terjadinya suatu peristiwa. Sedangkan sumber dalam bentuk agensi adalah berita-berita yang didapatkan dari agensi berita lain baik agensi nasional seperti *Antara* maupun agensi internasional seperti *Associated Press* (AP) dan *United Press International* (UPI) dari Amerika Serikat, *Agence France Press* (AFP) dari Perancis, *Reuters* dari Inggris dan agensi-agensi lain.

**Tabel 3**

Sumber Berita	Masa	
	Sebelum Darurat Militer	Selama Darurat Militer
Elit pemerintah	44 (49%)	46 (51%)
TNI / Polisi	13 (29%)	32 (71%)
GAM	8 (100%)	-
Masyarakat	34 (72%)	13 (28%)
Agensi berita	5 (38%)	9 (62%)
<b>Total</b>	<b>104</b>	<b>100</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari segi sumber berita, tabel 3 menunjukkan bahwa ada perbedaan mengenai sumber berita di surat khabar *Serambi Indonesia* antara sebelum dan selama Darurat Militer di Aceh. Selama Darurat Militer banyak berita yang bersumber dari elit pemerintah maupun TNI/polisi.

Perbedaan yang sangat signifikan adalah berita-berita yang bersumber dari masyarakat ataupun GAM. Selama Darurat Militer berita yang bersumber dari masyarakat jauh lebih sedikit berbanding sebelum Darurat Militer di Aceh. Sedangkan berita yang bersumber dari GAM tidak ada sama sekali.

### Nilai Berita

Nilai berita dibentuk melalui pencarian informasi dan peristiwa di lingkungan masyarakat sampai menilai informasi tersebut layak dijadikan berita atau tidak. Nilai berita mampu memberikan kepuasan bukan saja kepada pembacanya tetapi juga memberikan kepentingan bagi lingkungannya. Menurut Campbell (1999), setiap surat kabar mempunyai nilai berita yang berbeda dengan surat kabar lain. Karena itu sangat bergantung kepada tujuan dan maksud dari berita itu disaat ia muncul dalam masyarakat.

Sebuah berita dianggap bernilai sekiranya mengandung beberapa kriteria seperti yang telah dinyatakan oleh Ryan dan Tankard (1977). Ryan dan Tankard (1977) menyatakan bahwa penilaian berita dibagikan kepada 7 perkara:

#### 1. Kedekatan (*proximity*)

Kedekatan didefinisikan sebagai sebuah berita yang berkaitan dengan orang, peristiwa, organisasi dan institusi yang terjadi di tempat yang dekat dengan perusahaan penerbit surat khabar. Kedekatan ini merupakan nilai berita yang paling penting. Pembaca ingin mengetahui sesuatu yang terjadi dalam masyarakatnya sendiri. Mereka ingin mengetahui mengenai tetangga mereka, kawan-kawan mereka, saudara mereka dipublikasikan dalam berita. Editor percaya bahwa pembaca lebih tertarik mengenai peristiwa yang terjadi dalam masyarakatnya sendiri daripada peristiwa yang terjadi di tempat lain (Ryan dan Tankard 1977).

#### 2. Terkemuka (*prominence*)

Terkemuka adalah berita yang melibatkan tokoh-tokoh terkenal, institusi-institusi terkenal (Ryan dan Tankard 1977). Mencher (1984), terkemuka maksudnya berita yang berasal dari orang penting dalam struktur pemerintahan atau figur masyarakat. Terkemuka dari segi institusi adalah institusi penting dalam masyarakat, misalnya Istana Negara terbakar.

#### 3. Ketepatan Waktu (*timeliness*)

Ketepatan waktu bisa disebut juga dengan aktual. Maksud aktual adalah peristiwa-peristiwa yang baru terjadi. Mencher (1984) mengatakan bahwa suatu yang terjadi kemarin adalah berita tua (sudah basi) karena sudah diberitakan oleh media lain. Sesuatu berita mempunyai nilai berita yang tinggi, apabila berita itu tidak lama terjadi sehingga pembaca tidak mengetahui dari media lain.

#### 4. Pengaruh (*impact*)

Sesuatu berita mempunyai nilai berita yang tinggi apabila berita itu mempunyai pengaruh kepada pembaca baik sekarang maupun akan datang (Ryan dan Tankard 1977).

#### 5. Kebesaran (*Magnitude*)

Apabila sebuah berita mempunyai nilai berita yang tinggi, berita itu dapat dilihat dari segi jumlah yang terlibat dalam peristiwa suatu peristiwa. Mencher (1984), kebesaran dalam sebuah peristiwa mempunyai perbedaan yang sangat penting dari segi pengaruh, hubungan antara sebuah peristiwa dengan peristiwa lain, peristiwa yang melibatkan banyak orang, kerusakan lingkungan dalam skala besar,

prestasi yang tinggi, dan mempunyai keuntungan dan kerugian dalam jumlah besar. Semakin besar yang terlibat semakin penting berita itu. Ryan dan Tankard (1977), kebesaran dalam sebuah berita adalah sesuatu yang tidak dapat dipastikan. Contoh, 100 orang yang sedang demonstrasi bukan berita besar di San Francisco. Barangkali 100 orang yang sedang demonstrasi di Aceh akan menjadi berita besar di daerah ini.

6. Konflik (*conflict*)

Konflik adalah sesuatu pertentangan baik melalui perbuatan ataupun pikiran antara individu, negara, organisasi, dengan binatang dan dengan benda-benda hidup lainnya. Konflik adalah fakta yang terjadi di alam sekitar. Seperti perbedaan pendapat, perdebatan dalam politik dan demonstrasi yang membawa kepada kekerasan (Ryan dan Tankard 1977). Mencher (1984) konflik adalah perselisihan antara individu-individu atau institusi-institusi.

7. Keanehan (*odddity*)

Suatu berita mempunyai nilai berita apabila berita itu harus menarik perhatian pembaca, karena berita yang menarik akan menimbulkan minat masyarakat untuk membaca. Berita yang menarik perhatian adalah sesuatu yang baru didengar oleh pembaca atau sesuatu yang jarang terjadi (Ryan dan Tankard 1977). Apabila suatu berita besar, tetapi sudah tiap hari pembaca membaca berita dalam bentuk yang sama, maka berita itu bukan dikatakan berita yang menarik dan kurang menimbulkan minat masyarakat untuk membaca. Contoh berita yang menarik dan sekaligus dapat menimbulkan minat masyarakat untuk membaca adalah '*manusia menggigit anjing*' itu berita menarik, tapi jika '*anjing menggigit manusia*' itu bukan berita menarik.

signifikan dari segi nilai berita kedekatan dan nilai berita konflik. Nilai berita kedekatan, banyak diberitakan selama Darurat Militer di Aceh. Sedangkan dari segi nilai berita konflik banyak diberitakan sebelum Darurat Militer di Aceh.

**Contoh Pemberitaan Surat Kabar *Serambi Indonesia***

**Sebelum Darurat Militer**

Panglima Komando Iskandar Muda, Mayor Jenderal M. Djalil Yusuf meminta masyarakat Aceh tidak perlu takut menghadapi segala kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi. Kami dari TNI tidak akan membunuh orang Aceh. Saya ini orang Aceh, percayalah kepada saya. Kami tidak akan membunuh masyarakat Aceh yang tidak bersalah (*Serambi Indonesia*, 9 May 2003).

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memberikan maklumat bahwa keadaan Aceh sekarang sudah di ambang perang, dan memerintahkan pasukannya untuk kembali mempertahankan akan segala kemungkinan yang terjadi. GAM juga memerintahkan seluruh pegawai-pegawai pemerintah, dan tempat-tempat penting lainnya agar tutup dan menghentikan aktivitasnya. Maklumat ini dikeluarkan oleh jurubicara militer GAM, Sofyan Dawood (*Serambi Indonesia*, 9 May 2003).

**Selama Darurat Militer**

Menteri Politik dan Keamanan, Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa Darurat Militer di provinsi Aceh dapat diperpanjang, bahkan hingga Pemilu 2004 mendatang dan tidak harus selesai dalam enam bulan pertama pemberlakuan Darurat Militer di provinsi tersebut (*Serambi Indonesia*, 5 September 2003).

Empat kejadian perang terjadi di daerah Pidie kemarin, menewaskan lima anggota GAM, termasuk di Tiro yang termasuk daerah Zona Damai. Sementara lima senjata milik GAM berhasil didapatkan oleh pasukan TNI. Sedangkan di Aceh Utara, Isteri Hanafiah, politisi senior partai Golkar ditembak mati oleh orang tak dikenal (*Serambi Indonesia*, 9 April 2003).

**Kesimpulan**

Secara umum bentuk pemberitaan surat khabar *Serambi Indonesia* antara sebelum dengan selama Darurat Militer di Aceh mengalami perbedaan. Daripada 204 berita yang telah diuji dengan ujian statistik menunjukkan hal yang demikian. Walaupun negara Indonesia telah mengalami perbedaan corak pemerintahan dari bentuk pemerintahan Orde Baru yang terkenal lebih otoriter

**Tabel 4**

Nilai Berita	Masa	
	Sebelum Darurat Militer	Selama Darurat Militer
Kedekatan	62 (44%)	78 (56%)
Terkemuka	4 (44%)	5 (56%)
Pengaruh	5 (56%)	4 (44%)
Kebesaran	2 (100%)	-
Konflik	26 (77%)	8 (23%)
Keanehan	5 (50%)	5 (50%)
<b>Total</b>	<b>104</b>	<b>100</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari nilai berita, tabel 4 di atas menunjukkan bentuk pemberitaan surat khabar *Serambi Indonesia* mempunyai perbedaan yang sangat

kepada zaman pemerintahan Reformasi yang menjamin kebebasan berpendapat dan mendapat informasi. Kemerdekaan berpendapat dan mendapat informasi perlu mendapat jaminan dan perlindungan hukum serta bebas dari campur tangan dan paksaan pihak lain. Zaman Reformasi disebutkan juga dengan zaman kebebasan media. Kebebasan terhadap media merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur terpenting dalam penegakkan demokrasi.

Tetapi selama Darurat Militer terjadi Aceh, tidak ada kebebasan media yang nyata di daerah ini. Pemerintah mengambil peranan dalam pemberitaan terhadap isu-isu mengenai Aceh. Pemberitaan di daerah konflik Aceh tidak sama seperti pemberitaan pada daerah lain yang keadaan daerahnya lebih kondusif. Selama Darurat Militer terjadi di Aceh banyak berita muncul dari TNI. Berita yang bersumber dari masyarakat dikurangkan. Sedangkan berita yang bersumber dari GAM tidak diberikan ruang untuk diberitakan. Padahal sebelum Darurat Militer terjadi, surat khabar *Serambi Indonesia* memberikan prioritas pada berita-berita bersumber dari masyarakat. Begitu juga berita bersumber dari GAM.

Apabila diikutkan kepada konsep pemberitaan, berita bersumber dari pihak lawan yang berkonflik, maka ia akan senantiasa menjelekkkan pihak lain yang menjadi lawan konfliknya. Hal ini dilakukan oleh TNI ataupun pemerintah demi menjaga keselamatan negara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa keadaan sosio-budaya, ekonomi dan politik di sebuah negara mempengaruhi corak penyertaan masyarakat dalam media. Dengan kata lain, apabila keadaan negara berada dalam situasi yang terancam maka pemberitaan melalui media dilakukan sangat berhati-hati, berbanding dengan negara-negara yang keadaan sosio-budaya, ekonomi dan politik yang tenang. Biasanya pengawasan terhadap media akan sentiasa berlaku apabila lingkungan sebuah negara berada dalam keadaan yang tidak stabil. Dalam suasana yang begini kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan di bawah sistem libertarian dihindarkan sekali. Keterlibatan masyarakat dalam pemberitaan dikurangi, malah adakalanya tidak ada ruang untuk memberitakan mengenai berita yang bersumber dari masyarakat. Perusahaan-perusahaan penerbitan surat khabar boleh diambilalih oleh pemerintah atau berada pada pengawasan khusus dalam aktivitas kewartawanan. Para wartawan diminta secara langsung atau tidak, memberi atau sekurang-kurangnya menunjukkan sikap dukungan terhadap pemerintah. Wartawan tidak diberikan

kebebasan dalam menentukan isi surat khabar. Wartawan diwajibkan untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan demikian, surat khabar *Serambi Indonesia* selama Darurat Militer di Aceh menerapkan *Teori Media Negara Membangun*, karena banyak berita yang dimuat dalam surat khabar *Serambi Indonesia* dalam jangka masa tersebut bertujuan untuk membawa perubahan ke arah penyelesaian konflik dan demi menjaga keutuhan negara Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Asiah Sarji, "Pengaruh persekitaran politik dan sosio-budaya terhadap pembangunan radio Malaya di antara tahun 1920-1959", Disertasi Doktor Falsafah, Pusat Pengajian Siswazah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 1995.
- Campbell, F, "*The construction of environmental news: a study of Scottish journalism*", Ashgate Publishing, England, 1999.
- Cohen, B, "*The press and foreign policy*", Princeton, Princeton University Press, New Jersey, 1963.
- Dutton, B, "*The media*", Longman, London, 1986.
- Faridah Ibrahim & Mohd Rajib Ab Ghani, "Wartawan dan Etika dalam Era Siber", Dalam. Faridah Ibrahim & Mus Chairil Samani (ed.), Etika Kewartawanan, Edisi ke-2, F.A.R Publishers, Subang Jaya, 2000.
- F. Rachmadi, "Perbandingan sistem pers: Analisis deskriptif sistem pers di berbagai negara", PT Gramedia, Jakarta, 1990.
- Gramsci, A, "*Selection from the prison notebooks*", International Publisher, New York, 1971.
- Green, T, Dalam. Sydney W. Head (ed.), "*Broadcasting in Africa: a continental survey of radio and television*", Temple University Press, Philadelphia, 1974.
- Hachten, W., A, "*The world news prism, chaging media: clashing ideologies*", Iowa State University Press, Ames, 1981.

- Hooper, A, *"The military and media"*, Gower Publishing, London, 1984.
- Ibnu Hamad, "Keperluan mengubah Undang-undang No. 40 Tahun 1999", [www.kompas.com/kompas-cetak/0206/18/opini/kepe04.htm](http://www.kompas.com/kompas-cetak/0206/18/opini/kepe04.htm) (7 Desember 2004).
- Ichlasul Amal, "Kebebasan press dihadap kekerasan massa", <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0010/02/nasional/kebe07.htm> (13 Juni 2004).
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No 28 Tahun 2003.
- Lippmann, W, *"The nature of news"*, Dalam. Steinberg, C. S. (ed.). *Mass Media and Communication*. Edisi ke-2, Hastings House Publishers, New York, 1972.
- Maeseneer, P, "Inilah berita: manual berita radio", Terj. Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1986.
- M. Isa Sulaiman, "Aceh Merdeka: ideologi, kepemimpinan dan gerakan", Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2000.
- M. Kaoy Syah & Lukman Hakiem, "Keistimewaan Aceh dalam lintasan sejarah", Pengurus Besar Al-Jami'iyatul Washliyah, Jakarta, 2000.
- McQuail, D, *"Media performance: mass media communication and the public interest"*, Sage Publications, London, 1992.
- McQuail, D, *"Mass communication theory: an introduction"*, Edisi ke-2, Sage Publications, London, 1987.
- Merrill, J.,C, *"The imperative of freedom: A philosophy of journalism autonomy"*, Hastings House Publishers, New York, 1974.
- Moh. Mahfud MD, "Hukum dan pilar-pilar demokrasi", Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Mohd. Safar Hasim, "Sistem akhbar dari perspektif kuasa", Simposium Penyelidikan Komunikasi, Teras Pencapaian Wawasan 2020. 7-8 Sept, Jabatan Komunikasi, UKM, Bangi, 1993.
- Mohd. Salleh Kassim, "Kewartawanan teori dan praktik", Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1985.
- M. Ridha Saleh, "Press statement", WALHI. 20 Mei 2003.
- Neta S. Pane, "Sejarah dan kekuatan Gerakan Aceh Merdeka", PT Grasindo, Jakarta, 2001.
- Nor Zaliza Sarmiti, "Pemilihan dan penilaian berita pembangunan Malaysia: kajian kes ke atas akhbar Utusan Malaysia dan New Straits Times". *Thesis S2*, Pusat Pengajian Media dan Komunikasi, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 2003.
- Nurdin Abd. Halim, "Liputan berita tentang krisis ekonomi dan reformasi politik di Indonesia: kajian kes terhadap liputan akhbar Utusan Malaysia dan News Straits Times", *Thesis S2*. Pusat Pengajian Media dan Komunikasi, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 2001.
- Othman Puteh, "Esei-esei kesusasteraan", Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 1981.
- Riza Sihbudi, Awani Irewati, Ikrar Nusa Bhakti, Moch. Nurhasim, syamsuddin Haris & Tri Ratnawati, "Bara dalam sekam: identifikasi akar masalah dan solusi atas konflik-konflik lokal di Aceh, Maluku, Papua dan Riau", Mizan, Bandung, 2001.
- Ryan, M. & Tankard, J., W., Jr, "Basic news reporting", Mayfield Publishing Company, New York, 1977.
- Sayadi (ed.), "Aceh Jakarta dan Papua: akar permasalahan dan alternatif proses penyelesaian konflik", YAPPIKA, Jakarta, 2001.
- Schramm, W, *"The process and effects of mass communications"*, University of Illinois Press, Urbana, 1977.
- Shukor Kholil, "Liputan agensi berita antara bangsa tentang dunia Islam yang disiarkan dalam

akhbar Indonesia”, *Jurnal Komunikasi*. **16**  
(16): 161-176, 2000.

Siti Suryani Othman, ”Objektifiti bahasa dalam Utusan Malaysia dan Berita Harian: satu kajian terhadap pelaksanaan Bahasa Inggeris dalam mata pelajaran sains dan matematik”, *Thesis S2*, Pusat Pengajian Media dan Komunikasi, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 2004.